

PERAN PENGAWAS DALAM MENERAPKAN PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR

Revi Arfamaini^a

Tjiptohadi Sawarjuwono^b

^a Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga ^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email: arfamaini@yandex.com^a; tjiptohadi@feb.unair.ac.id^b

ARTICLE HISTORY

Received:

9 June 2019

Revised

6 July 2019

Accepted:

22 July 2019

Online available:

10 November 2019

Keywords:

Controller,
Internal Auditor,
Internal Control,
Internal Control
Framework by COSO in
1992,
Effectiveness.

Kata Kunci:

Pengawas,
Auditor Internal,
Pengendalian Intern,
Kerangka Kerja
Pengendalian Intern
oleh COSO tahun
1992,
Efektifitas.

ABSTRACT

Introduction: Implementation of internal control is one of the organization's efforts must be made to improve the effectiveness of its operations. How to implement internal control is to implement an integrated framework published by COSO in 1992. Internal control not only on the organization, credit unions must implement internal control. This is because credit unions have an activity in the form of lending on credit to members. Lending on credit can lead to an unsuccessful uncollectible receivables that have threats that can cause harm. Threats include non-performing loans, human error and fraud. Internal controls will be run in accordance with the plan, if the controller cooperatives perform functions as an internal auditor to evaluate and provide recommendations on the implementation of internal control improvements that have been running on credit unions. Thus, the purpose of this study was to determine the role of the controller as a function of the internal auditor in the application of internal control of credit on GKPRI JATIM.

Methods: The method used is the method of participation observation to determine the application of internal control GKPRI JATIM. Furthermore, assessment of internal control so as to know GKPRI JATIM controller role as internal auditor function components based control framework published by COSO in 1992.

Results: As a result, controllers should consider several things that made cooperative organizational structure, procedures and policies are implemented cooperative lending, risk mapping and assessment of all credit control activities undertaken management to be able to detect problems that emerge early on.

Conclusion and suggestion: Thus, internal control can be run effectively.

ABSTRAK

Penerapan pengendalian intern merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan organisasi untuk meningkatkan efektifitas kegiatan operasionalnya. Cara menerapkan pengendalian intern adalah mengimplementasikan kerangka kerja terintegrasi yang dipublikasikan oleh COSO tahun 1992. Pengendalian intern tidak hanya dilakukan pada organisasi, koperasi simpan pinjam pun harus menerapkan pengendalian intern. Hal ini dikarenakan, koperasi simpan pinjam memiliki aktivitas yang berupa pemberian pinjaman secara kredit kepada para anggota. Pemberian pinjaman secara kredit dapat menimbulkan piutang yang belum berhasil tertagih sehingga memiliki ancaman yang dapat menyebabkan kerugian. Ancaman tersebut antara lain kredit macet, *human error* dan kecurangan. Pengendalian intern akan berjalan sesuai dengan rencananya, jika pengawas koperasi melakukan fungsi sebagai auditor internal untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas penerapan pengendalian intern yang sudah berjalan pada koperasi simpan pinjam. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawas sebagai fungsi auditor internal dalam penerapan pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada GKPRI JATIM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *participation observation* untuk mengetahui penerapan pengendalian intern yang terjadi pada GKPRI JATIM. Selanjutnya, melakukan penilaian pengendalian intern GKPRI JATIM sehingga dapat diketahui peran pengawas sebagai fungsi auditor internal berdasarkan komponen-komponen kerangka kerja pengendalian yang dipublikasikan oleh COSO tahun 1992. Hasilnya, pengawas harus memperhatikan beberapa hal yaitu struktur organisasi yang dibuat koperasi, prosedur dan kebijakan pemberian kredit yang diterapkan koperasi, pemetaan risiko dan melakukan penilaian terhadap seluruh aktivitas pengendalian pemberian kredit yang dilakukan manajemen untuk dapat mendeteksi permasalahan yang muncul sejak dini. Sehingga, pengendalian intern dapat berjalan secara efektif.

INTRODUCTION

Salah satu upaya yang harus dilakukan organisasi untuk meningkatkan efektifitas operasional perusahaan adalah menerapkan pengendalian intern (Michael, 2008: hal.29). Cara menerapkan pengendalian intern adalah mengimplementasikan kerangka kerja terintegrasi yang dipublikasikan oleh COSO pada tahun 1992 (Gupta & Thomson, 2006).

Pengendalian intern selalu diterapkan pada masing-masing organisasi yang gunanya untuk meningkatkan efektifitas operasional organisasi, termasuk pada organisasi koperasi simpan pinjam. Salah satunya adalah Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur (GKPRI JATIM). Permasalahan yang menjadi fokus utama pada GKPRI JATIM berupa pemberian kredit berupa uang yang menimbulkan besarnya jumlah piutang yang belum berhasil tertagih. Permasalahan ini mengharuskan manajer

untuk membuat desain pengendalian intern yang memadai sehingga menghasilkan informasi yang sesuai dengan kondisi.

Penerapan pengendalian intern yang terdapat pada GKPRI JATIM dengan cara melakukan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus. Pengurus dapat memilih seorang manajer untuk mengelola secara detail kegiatan operasional koperasi sehingga pengendalian intern pada koperasi dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Namun, manajer dan karyawan membutuhkan evaluasi agar kemampuan dalam mengelola operasional koperasi dapat meningkat (Candрева, 2006).

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peran pengawas koperasi sebagai fungsi auditor internal dalam menerapkan pengendalian intern. Diharapkan kegiatan operasional koperasi dapat berjalan efektif, artinya dapat meminimalisasi permasalahan yang ada.

LITERATURE REVIEW

Setiap entitas perlu memahami ruang lingkup pengendalian intern yang merupakan dasar munculnya permasalahan, sehingga pengendalian intern perlu dikembangkan dengan berbagai macam metode. Salah satu cara mengembangkan pengendalian intern yaitu dengan menggunakan metode Internal Control Integrated Framework yang dipublikasikan oleh COSO. Menurut COSO, pengendalian intern adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dipengaruhi oleh setiap badan suatu entitas (Hubbard, 2003). Tujuan tersebut terdiri dari (Ricketts, 1992 ; Stevens, 2003):

1. Keandalan laporan keuangan.
2. Efektifitas dan efisiensi operasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 1992, COSO berhasil membuat kerangka kerja yang dikenal dengan nama *Internal Control – Integrated Framework* yang menjadi pedoman para eksekutif, dewan direksi, penyusun standar dan organisasi lainnya untuk mengukur efektifitas pengendalian intern mereka (Anonymous, 1992).

The traditional society

Pengendalian intern dapat terlaksana dengan baik jika adanya peran auditor internal atau bagian pengawasan intern (Muljono, 2012: hal.377). Pengawas atau pemeriksa intern bertugas melakukan pengawasan, penilaian, pemeriksaan, dan kecocokan untuk menetapkan dan memeriksa pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta catatan yang berhubungan dengan keuangan. Maka dari itu pengawas dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dalam mengelola koperasi (Hendrojogi, 2002; 159).

RESEARCH METHODS

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *participating observation* (Langhout, 2003 ; Palson, 2007 ; Culley & Hughey, 2008 ; Bohm Legewie & Dienel, 2008 ; Hofman, 2009 ; Keiding, 2010;). Penelitian ini difokuskan pada penerapan pengendalian intern pemberian kredit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengetahui peran pengawas sebagai fungsi auditor internal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena data tersebut berupa fakta-fakta tertulis atau lisan. Data dan informasi yang akan diperoleh berupa penerapan pengendalian intern pemberian kredit pada GKPRI JATIM. Sumber perolehan data dan informasi dilakukan dengan cara: observasi, dokumentasi, wawancara formal dan informal.

RESULT AND ANALYSIS

Berdasarkan penerapan metode penelitian diatas, diperoleh penerapan pengendalian intern dan peran pengawas pada pemberian kredit pada GKPRI JATIM didasarkan pada lima komponen COSO tahun 1992 sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan pengendalian terhadap kegiatan operasional pemberian kredit GKPRI JATIM. Manajemen GKPRI JATIM menerapkan lingkungan pengendalian pemberian kredit yang terdiri dari:

1. Melakukan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab kepada pihak-pihak yang melayani dalam proses pemberian kredit. Pihak-pihak yang terlibat adalah bagian kredit, kasir, bagian administrasi dan manajer.
2. Pembuatan prosedur dan kebijakan manusia. Prosedur secara tertulis belum ada. Langkah-langkah yang harus ditempuh karyawan berdasarkan pengalaman karyawan terdahulu yang diajarkan kepada karyawan lama dan sesekali di periksa oleh manajer koperasi.
3. Memperhatikan kompetensi dan kemampuan karyawan dengan cara melakukan penempatan sesuai dengan pendidikan, pengeluaran, keterampilan serta pengalaman yang dimiliki sumber daya manusia.

Peran Pengawas pada Lingkungan Pengendalian

Pengawas harus memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap penerapan pengendalian intern pada GKPRI JATIM pada lingkungan pengendalian. Penilaian dan rekomendasi tersebut meliputi:

1. GKPRI JATIM belum memiliki struktur organisasi, oleh karena itu pengawas perlu memberikan gambaran mengenai struktur organisasi yang sesuai dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

2. GKPRI JATIM belum memiliki prosedur dan kebijakan manusia secara tertulis sehingga pengawas perlu memberikan rekomendasi terkait dengan pembuatan prosedur dan kebijakan manusia untuk menunjang lancarnya proses pemberian kredit:
3. GKPRI JATIM sudah membuat pembagian dan uraian tugas yang harus dijalankan oleh karyawan. Pada bagian kredit tidak diberikan fungsi sebagai analis kredit. Pengawas perlu memberikan rekomendasi kepada pengurus terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisa kredit.

Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko merupakan hal penting dalam setiap manajemen suatu organisasi untuk menghadapi masalah yang pernah atau yang akan muncul. Berikut ini masalah-masalah yang pernah muncul pada GKPRI adalah sebagai berikut :

1. Pihak peminjam dana kredit tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar dana yang dipinjamnya karena peminjam meninggal dunia dan menghilangkan jejak sehingga dapat menimbulkan kredit macet murni. Sedangkan, kredit macet tidak murni yaitu kredit yang masih bisa ditagih oleh karyawan tapi dianggap kredit macet dan tidak dilaporkan pada kasir koperasi.
2. Tidak adanya prosedur kegiatan operasional secara tertulis yang dilakukan karyawan dan sistem pencatatan transaksi masih dilaksanakan secara manual sehingga terdapat kemungkinan terdapat *human error* dan penyimpangan yang dilakukan oleh para staff karyawan.
3. Tidak patuhnya karyawan dalam mentaati jam kerja yang harus dijalankan karyawan, sehingga dapat berpengaruh pada tugas-tugas yang diberikan kepada karyawan yaitu:
 - a. Karyawan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.
 - b. Pencatatan dan pembuatan laporan masih terdapat banyak kesalahan.
 - c. Banyak alasan yang diungkapkan dalam target menyelesaikan tugas yang berujung pada saling menyalahkan antar karyawan.
4. Masih menggunakan sistem manual dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada karyawan. Sistem komputerisasi hanya digunakan dalam membuat laporan.

Peran Pengawas pada Penaksiran Risiko

Pengawas berperan penting membantu manajemen untuk memberikan rekomendasi terhadap risiko yang muncul dan membuat pemetaan risikonya. Pemetaan risiko pada GKPRI JATIM sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit

Risiko kredit kemungkinan muncul karena pernah terdapat kredit macet. Pengawas perlu memberikan rekomendasi pembuatan prosedur pada proses pemberian kredit agar kredit macet tersebut dapat diminimalisasi.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional muncul karena terdapat permasalahan pada karyawan dalam menjalankan tugasnya (membuat laporan piutang dan melakukan konfirmasi pembayaran piutang). Pengawas harus memberikan rekomendasi untuk pembuatan prosedur dalam melakukan penagihan piutang.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan harus diperhatikan oleh pengawas, karena permasalahan yang muncul juga disebabkan karena tidak patuhnya karyawan terhadap peraturan seperti tidak tepat waktu dalam kehadiran bekerja. Rekomendasi yang diberikan karyawan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sumber daya manusia.

Jadi, pengawas hanya memberikan rekomendasi atau saran agar risiko dapat diminimalisasi, yang dapat mengendalikan risiko tersebut adalah pihak manajemen GKPRI.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian harus dilakukan pada seluruh kegiatan operasional. Hal ini untuk meminimalisasi masalah dan ancaman yang akan muncul. Berikut ini penerapan aktivitas pengendalian GKPRI yang didasarkan pada COSO, yaitu:

1. Pemberian otorisasi harus diperhatikan untuk melakukan pengesahan dokumen-dokumen dalam proses pemberian kredit.
2. Pemisahan tugas (pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab) dapat mendukung terciptanya pengendalian intern yang memadai.
3. Melakukan penjagaan catatan dan dokumen. Dokumen yang sudah ditata belum terdapat sistem pengkodean dan pembagian untuk setiap karyawan.
4. Pembuatan prosedur dan kebijakan terhadap pemberian pinjaman kredit. Namun, koperasi GKPRI belum memiliki prosedur dan kebijakan sumber daya manusia.

Jika prosedur dan kebijakan pemberian kredit tersebut menimbulkan masalah, maka prosedur dan kebijakan tersebut diperbaharui sesuai kondisi. Pembuatan tersebut juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian kegiatan operasional dengan prosedur dan kebijakan dengan didukung dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh peminjam.

Peran Pengawas pada Aktifitas Pengendalian

Penerapan aktivitas pengendalian pada GKPRI JATIM hanya mengacu pada prosedur dan kebijakan pemberian kredit, belum menerapkan aktifitas pengendalian berupa prosedur dan kebijakan sumber daya manusia.

Pengawas harus memperhatikan beberapa hal dalam pembuatan prosedur dan kebijakan sumber daya manusia, yaitu:

- a. Pelatihan dan pengembangan karyawan berupa tata cara bersikap, berbicara dan merespon dalam menyelesaikan masalah dan menyampaikan/menerima informasi dari/oleh peminjam.
- b. Ketentuan kehadiran berupa presensi yang meliputi nama, jabatan, jam kedatangan dan jam pulang sebagai pendukung dalam ketepatan pengerjaan tugas yang diberikan kepada karyawan sehingga laporan-laporan yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh GKPRI JATIM.
- c. Tata tertib dan sanksi yang merupakan aktifitas pengendalian yang harus benar-benar diterapkan meliputi penggunaan barang-barang diperusahaan, pemisahan fungsi dalam menjalankan tugas dan aturan terhadap sikap yang seharusnya dilakukan.
- d. Kinerja Karyawan seperti ketentuan dalam berpenampilan, penentuan sikap dalam melakukan seluruh kegiatan dan ketentuan dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- e. Pemberian otorisasi terhadap laporan oleh dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengemban tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya .

Informasi dan Komunikasi

GKPRI JATIM sudah menerapkan informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan:

1. Pemberian informasi mengenai proses kredit. Keseluruhan pembuatan laporan didasarkan pada dokumen berkas permohonan kredit yang diisi oleh peminjam dan disetujui oleh pengurus GKPRI JATIM.
2. Komunikasi yang dilakukan berupa pemberian laporan mengenai proses kredit dan manajer melakukan tanya jawab kepada staff karyawan jika laporan tersebut tidak dipahami serta mengenai jumlah piutang peminjam dan waktu pembayaran peminjam.

Peran Pengawas pada Informasi dan Komunikasi

Pengawas harus memperhatikan komunikasi yang merupakan cara manajemen memberikan informasi kepada karyawan secara lisan. Informasi dan komunikasi yang harus diperhatikan adalah pada proses:

- a. Penyampaian informasi mengenai persyaratan kredit.
- b. Pengisian formulir permohonan pinjaman oleh peminjam yang mengandung informasi mengenai jumlah pinjaman yang diinginkan, jenis pembayaran kredit yang

dipilih, latar belakang peminjam seperti pekerjaan dan pendapatan yang diterima dan jaminan yang diajukan.

- c. Laporan survey kredit kepada peminjam yang dilakukan oleh karyawan bagian kredit.
- d. Dasar keputusan kredit dan pengeluaran kas untuk pemberian pinjaman dana kredit.

Pengawas harus memastikan mengenai keabsahan informasi dan komunikasi yang dilakukan. Cara memastikannya mencocokkan kesesuaian prosedur yang dibuat dengan realisasi pekerjaan yang dilakukan.

Monitoring

Pemantauan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kegiatan dan dokumen berdasarkan prosedur dan kebijakan yang dibuat yaitu:

1. Permohonan dan persyaratan kredit

Pengecekan dilakukan mengenai penyampaian informasi kepada peminjam mengenai persyaratan kredit yang diajukan. Pengecekannya dilakukan melalui berkas kredit yang sudah diisi oleh peminjam untuk dipastikan keaslian dan keabsahannya.

2. Jenis pembayaran kredit dan jangka waktu kredit

Pengecekan dilakukan berdasarkan jenis pembayaran kredit yang diajukan oleh peminjam beserta jangka waktu yang disepakati. Seluruh informasinya terdapat pada berkas kredit dan rekapitulasinya. Pengecekan dilakukan dengan menghitung ulang setiap terdapat peminjam baru. GKPRI JATIM tidak melakukan pengecekan terhadap rekapitulasi yang dibuat oleh karyawan.

3. Analisa dan survey kredit

Analisa kredit yang dilakukan merupakan analisa terhadap semua berkas dan kelengkapan kredit yang diajukan oleh peminjam. Sedangkan, survey kredit mencakup kegiatan nasabah, pekerjaan nasabah serta jabatan dan keberadaan nasabah.

Peran Pengawas pada Monitoring

Pemantauan tersebut dilakukan pada seluruh bagian yang ada pada GKPRI JATIM, yaitu dengan cara:

1. Menentukan dasar pemantauan

Pemantauan yang dilakukan yaitu pada unit simpan pinjam karena pemberian kredit sehingga menyebabkan piutang yang belum tertagih yang disebabkan oleh kredit macet, kesalahan pencatatan.

2. Mendesain dan mengimplementasikan prosedur pemantauan

Pengawas harus membuat prosedur pemantauan yang meliputi pemantauan terhadap prosedur dan kebijakan pemberian kredit, penagihan piutang hingga penerimaan dan pengeluaran kas untuk memberikan pinjaman dan kemampuan karyawan dalam membuat laporan.

3. Menilai dan melaporkan temuan

Pengawas harus bisa menemukan temuan-temuan permasalahan. Temuan dapat berupa risiko-risiko yang akan muncul dan risiko bawaan yang sudah pernah ada pada GKPRI JATIM.

CONCLUSION

Berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pembahasan, bahwa :

1. GKPRI JATIM belum memiliki struktur organisasi dalam kegiatan operasionalnya. Jadi, selama ini kegiatan operasional pemberian kredit pada GKPRI JATIM hanya didasarkan pada uraian pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.
2. GKPRI JATIM belum memiliki karyawan yang bertugas sebagai analis kredit. Jika memang analis kredit tidak begitu diperlukan pada GKPRI.
3. GKPRI JATIM belum memiliki prosedur dan kebijakan manusia secara tertulis sehingga memungkinkan tindakan karyawan tidak bisa dikendalikan sehingga menimbulkan fraud.
4. GKPRI JATIM belum memiliki prosedur penyampaian informasi dalam pemberian kredit secara tertulis. Prosedur penyampaian pemberian kredit hanya berdasarkan pembagian tugas dan pengalaman karyawan terdahulu.

REFERENCES

- Anonymous, 1992. Accounting Groups Issue Report on Internal Control. *Management Accounting*. 74(6).
- Anonymous, 2005. Rebalancing Internal Audit in the Sarbanes-Oxley Era. *The CPA Journal*. 75(11).
- Anonymous, 2006. Communicating Internal Control Related Matters Identified in an Audit. *Journal of Accountancy*. 202(97).
- Bohm, B., Legewie, H., and Dienel, L.H., 2008. The Citizens' Exhibition: A Combination of Socio – Scientific Participative and Artistic Elements. *Qualitative Sosial Research*. 9(3).
- Candrea, P.J., 2006. Controlling Internal Controls. *Public Administration Review*. 66(3).
- Culley, R.M., and Hughey, J., 2008. Power and Public Participation in a Hazardous Waste Dispute: A Community Case Study. *Springer Science + Business Media*. 99 – 114.
- Fargher, N.L., and Gramling, A.A., 2010. Toward Improved Internal Controls.
- Gupta, P.P., and Thomson, J.C., 2006. Use of COSO 1992 in Management Reporting on Internal Control. *Strategic Finance*. 88(26).

- Hendrojogi., 2002. *Koperasi: Azaz-azaz, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hubbard, L.D., 2003. Understanding Internal Control. *The Internal Auditor Research*. 60(5).
- Hofman, L.D., 2009. Multiple Methods, Communicative Preferences and the Incremental Interview Approach Protocol. *Qualitative Social Research*. 10(1).
- Keiding, B.T., 2010. Observing Participating Observation – A- Re Description Based on Systems Theory.11(3).
- Langhout. D.R., 2003. Reconceptualizing Quantitative and Qualitative Methods. *American Journal of Community Phychology*.32(4).
- Michael, D., 2008. How to Comply with Sarbanes – Oxley Section 404: Assesing the Effectiveness of Internal Control.
- Muljono, D., 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi.
- Ricketts, J.B., 1992. New Inetrnal Control Framework and Evaluation Proposed by COSO. *Ohio CPA Journal*. 51(3).
- Stevens, M.G., 2003. Focus on Internal Controls. *The Practical Accountants Research*. 36(12).
- Undang – Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30, 32, 38 dan 39 tentang Tugas dan Wewenang Pengawas serta Pengurus.